

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masyarakat Indonesia sangat identik dengan keanekaragaman, mulai dari agama, suku, budaya, bahasa, letak geografisnya dan sebagainya. Dapat dikatakan masyarakatnya sangat multikultural. Misalnya saja dilihat dari segi agamanya, hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki agama. Pemerintah memberikan hak menganut agama kepada masyarakat tanpa ada paksaan namun tetap dengan batasan yang distandarisasikan dengan kesejahteraan semua umat beragama.

Kebebasan menganut agama dan keyakinan di Indonesia diatur negara dalam Undang-Undang Tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : (1) setiap orang punya hak untuk memiliki agama dan beribadah sesuai agamanya,.... (2) Setiap orang punya hak bebas memiliki keyakinan, menunjukkan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Radjawane, 2014).

Terdapat beberapa agama yang sudah disahkan oleh negara yaitu diantaranya Islam dengan jumlah penganut terbesar yaitu sebanyak 237.531.227 juta jiwa, Kristen Katolik dan Protestan dengan jumlah penganut sebanyak 20,45 juta jiwa, kemudian Hindu dengan jumlah penganut sebanyak 4,67 juta jiwa, Buddha dengan penganut sebanyak 2,03 juta jiwa, terakhir Konghucu dengan jumlah penganut sebanyak 76.635 jiwa (Bayu, 2022).

Selanjutnya mengenai keragaman sukunya. Namun disisi lain dalam mengelompokkan suku tidaklah mudah dan bahkan sulit dalam mendefinisikannya setara dengan apa yang disampaikan oleh Bauman (2004). Secara umum seseorang mengidentifikasi dirinya pada suku tertentu sesuai dengan keturunan, kebiasaan hidup, bahasa, hubungan kekerabatan, atau bahkan unsur politik. Selanjutnya agar memudahkan analisis data suku dilakukan koding pada setiap jawaban responden.

Dalam Sensus Penduduk (SP) 2010 tersedia 1331 kategori suku. Kategori tersebut merupakan kode untuk nama suku, nama lain/alias suatu suku, nama sub suku bahkan nama dari subsuku. Misalnya pada Suku Batak, kode yang terkait dengan Suku Batak adalah Batak Alas Kluet (0015), Batak Angkola/Angkola (0016), Batak Dairi/Dairi/Pakpak/Pakpak Dairi (0017), Batak Pak-Pak (0020), Batak Karo (0018), Batak Mandailing (0019), Batak Pesisir (0021), Batak Samosir (0022), Batak Simalungun/Simelungun Timur (0023), dan Batak Toba (0024).

Kerjasama BPS dengan *Institute Of Southeast Asian Studies* (ISEAS) pada tahun 2013 menghasilkan klasifikasi baru untuk menganalisis data suku yaitu nama lain, subsuku, dan sub-sub suku. Dari klasifikasi baru tersebut dihasilkan terdapat 633 kelompok suku besar. Selain melalui klasifikasi tersebut pengelompokkan suku dilakukan berdasarkan literatur seperti buku ensiklopedia suku maupun dari para jejaring yang tersebar di seluruh Nusantara (BPS, 2023).

Heterogenitas lainnya yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah mengenai keberagaman bahasa yang ada. Dilansir dari pemetaan bahasa di Indonesia yang dilakukan oleh badan pengembangan Bahasa dan Perbukuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) berjumlah 718 bahasa (Peter & Simatupang ,

2022), serta masih banyak lagi kondisi heterogenitas yang ada pada masyarakat Indonesia.

Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen ini dapat dikatakan sebagai kelompok masyarakat multikultural atau *multicultural society*. Hingga saat ini masyarakat Indonesia sudah menyanggah gelar sebagai masyarakat *multikultural society* yang sudah lama hidup dan bekerja sama sehingga mampu memosisikan dirinya dalam situasi yang mengharuskan mengesampingkan segala kepentingan pribadi dengan kesatuan sosial yang terjadi secara begitu alamiah dan natural. Sehingga meskipun ingin membuat pertentangan akan hal tersebut, kodratiah manusia yang memang diciptakan dalam kondisi yang beragam membuat pertentangan tersebut dapat diminimalisir dengan sebaik mungkin.

Dalam hal ini jika kata masyarakat disatukan dengan kata multikultural, maka setelah itu memiliki pemahaman makna yang sangat luas. Salah satu konsep awal mengenai masyarakat multikultural yang dikemukakan oleh Fay (1996), Jary dan Jary (1991), dan Watson (2000). Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (masyarakat bangsa layaknya Indonesia) dilihat sebagai yang mempunyai kebudayaan yang secara umum dapat digunakan pada masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik (Kariadi & Suprpto, 2017).

Realita kondisi di masyarakat terkait dengan kondisi heterogen pada semua aspek kehidupan harus benar-benar dikelola dengan sebaik mungkin baik dari pemerintah maupun masyarakat karena merupakan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun seringkali dibalik kelebihan terdapat kelemahan di dalamnya (Hasibuan, 2021). Dalam menyikapi keberagaman tersebut harus

dilandasi dengan pengetahuan mengenai hal tersebut untuk selanjutnya dibiasakan dalam setiap individu. Apabila tidak dilakukan tanpa adanya pengetahuan maka akan mudah timbulnya permasalahan atau konflik ditengah-tengah keberagaman tersebut.

Berikut beberapa contoh konflik antar agama yang ada, seperti konflik antarumat beragama Islam dan Kristiani di Poso (1998-2000), konflik antar umat nasrani dan islam di Ambon (1999), konflik antarumat Buddha dan Muslim di Lampung Selatan, peristiwa Bom Bali I dan II, dan konflik atau peristiwa yang terjadi lainnya (Purwanti, 2019).

Adapun konflik antarsuku yang pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia dikutip dari Kumparan.com diantaranya seperti baru-baru ini tahun 2022 kemarin konflik yang terjadi di Papua antara suku Nduga dan Lani Jaya tepatnya di Kampung Wouma yang ditimbul akibat adanya pembunuhan salah satu warga suku Nduga. Kedua konflik suku lampung dan Bali pada tahun 2012 kemarin. Ketiga pada konflik yang menjadi salah satu konflik suku terburuk sepanjang sejarah Indonesia yang terjadi pada tahun 2001 lalu yaitu konflik antar suku Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan tengah yang disebabkan oleh kecemburuan sosial dimana didominasi oleh suku pendatang, selain itu kedua suku pun sering terlibat dalam praktek perjudian.

Konflik antar suku selanjutnya yaitu konflik antara suku Aceh dan Jawa yang mulai terjadi bahkan pada masa kerajaan Majapahit yang menginvasi kerajaan Aceh hingga pada masa orde baru yang didominasi oleh suku jawa yang membuat suku aceh kecewa dan bahkan sampai pada melakukan gerakan separatis, yaitu

Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dikarenakan ketidaksukaanya pada suku pendatang. Konflik-konflik diatas memiliki konsekuensi yang cukup besar karena menimbulkan banyak sekali kerugian baik dari segi materi hingga memakan banyak korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit, misalnya korban yang gugur pada peristiwa GAM yang memakan korban jiwa kurang lebih sebanyak 15.000 jiwa (Kumparan, 2023).

Adapun beberapa hal yang menyebabkan konflik timbul seperti adanya Paksaan Kebenaran (*truth claim*) yaitu kecenderungan umat beragama yang berusaha membenarkan ajaran agamanya diiringi semangat yang menggelora, dengan catatan sebenarnya ia tidak paham atau belum memiliki pengetahuan yang cukup pada agamanya. Namun disisi lain ia meremehkan kebenaran orang lain yang tidak sependapat dengannya meskipun itu berasal dari satu agama. Kedua, Doktrin Jihad yaitu menghalalkan kekerasan atas nama Tuhan, padahal kekerasan dari pandangan manapun tidak dibenarkan salah satunya sudut pandang agama, terutama Islam, didalamnya menjadikan kedamaian sebagai inti ajarannya (Yunus, 2014).

Perbedaan nama yang diakibatkan dari perbedaan pemahaman atau perbedaan ideologi dalam sebuah masyarakat juga sangat memicu terjadinya konflik dalam sebuah kelompok masyarakat. Dalam konteks eksternal agama, juga di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia terjadi penolakan terhadap perkembangan ajaran agama lain di daerah lainnya (Rahmawanto, 2016).

Dalam hal mencegah terjadinya konflik antaragama pemerintah telah menghimbau masyarakat dengan adanya peraturan mengenai pembatasan agama.

Salah satunya dalam Pasal 18 ayat (3) UU No.12 tahun 2005 yang isinya menyatakan

“Seseorang dibatasi kebebasan untuk memiliki agama dan keyakinan oleh hukum agar melindungi keamanan, ketertiban atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain”. Pembatasan kebebasan yang diatur oleh hukum salah satunya untuk menghindari terjadinya konflik dan permasalahan lainnya. Maka dari itu diperlukan perilaku positif dari masyarakat dalam menyikapi keberagaman yang ada atau dengan kata lain warga negara harus mampu memposisikan dirinya sebagai warga negara yang berada di negara dengan kondisi yang beragama”. (Nurhayati & Agustina 2020).

Upaya mengurangi dan menyelesaikan konflik agama diatas berlaku juga terhadap konflik antarsuku yang terjadi di Indonesia. Adapun beberapa solusi lainnya untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan bersikap toleransi yang ditunjukkan minimal antarmasyarakat Indonesia dengan menjadikan kondisi yang berbeda tersebut bukan hal yang harus diperdebatkan atau disalahkan, akan tetapi dijadikan sebagai suatu kelebihan yang harus dijaga dengan sepenuh hati yang dibuktikan juga dengan bersikap empati, simpati dan saling bekerja sama. Artinya tidak hanya saling menghormati perbedaan yang ada, namun lebih dari pada itu untuk saling peduli dan kerja sama terhadap permasalahan yang ada, sehingga tidak sampai pada masyarakat yang bersikap apatis atau hanya mementingkan dirinya saja. Sikap saling peduli dan peka tersebut merupakan lanjutan dari sikap toleransi yang memang seharusnya dimiliki oleh masyarakat.

Sikap toleransi, saling peduli dan kerja sama merupakan sifat kodrati manusia yang berhubungan dengan kodrati manusia yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain dan secara kodratiah juga manusia diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda bukan tanpa alasan, namun salah satu alasannya adalah

untuk membiasakan manusia hidup saling menghormati, membantu dan mengasihi satu sama lainnya. Sikap atau watak yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu negara (warga negara) menjadi investasi jangka panjang yang dimiliki oleh sebuah negara termasuk Indonesia, warga negara seharusnya memiliki sikap yang berkiblat pada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Harapan negara untuk setiap warga negaranya memiliki sikap yang baik bukan semata-mata hanya untuk kepentingan negara secara struktural saja, namun standarisasi sikap tersebut dibuat karena sesuai dengan kebutuhan warga negaranya, sehingga manfaat yang paling besar dirasakan adalah warga negara itu sendiri.

Internalisasi nilai religius dan toleransi yang sudah didapatkan melalui lingkungan keluarga (rumah) akan dilanjutkan pada lingkungan sekolah dengan beberapa indikator pembelajaran dan sampai akhirnya pada realita lingkungan di masyarakat, sehingga pemahaman dan pemaknaan nilai religius dan toleransi ini sangat perlu dimiliki khususnya mengenai kondisi bangsa Indonesia yang sangat multikultural. Salah satunya mengenai kebhinekaan akan perbedaan agama, suku dan budaya yang ada.

Perwujudan internalisasi nilai religius dan toleransi di atas sudah direalisasikan dengan cukup baik oleh para masyarakat pada wilayah Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa barat. Wilayah ini selain terkenal pada masa lalu karena adanya unsur historis yang cukup kuat sehingga banyak sejarawan yang meneliti disana. Kecamatan Ciampea dikenal juga dengan keberagaman suku (Sunda, Tionghoa, Batak dan Ambon), agama (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Konghucu).

Terdapat kultur toleransi dan kerukunan yang jaga oleh warga disana secara turun temurun oleh setiap umat beragama. Kultur tersebut mulai dibiasakan masyarakat disana mulai dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat serta pemerintah dari sedini mungkin dari lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kolaborasi atau kerja sama antar masyarakat menjadi kekuatan tersendiri bagi kecamatan Ciampea menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Bogor yang tinggi nilai toleransi dan kerukunan atas keberagaman yang ada (Fadli, 2021).

Dalam hal ini peran tokoh masyarakat dalam menginternalisasikan nilai religius dan toleransi dalam masyarakat Kecamatan Ciampea ini juga sangat penting. Tokoh Masyarakat biasanya dijadikan teladan bagi masyarakat karena pemahaman jauh lebih mumpuni, sehingga apapun yang dilakukan maka tidak lama kemudian banyak yang mengikutinya, tentu dalam hal persoalan internalisasi *civic disposition* melalui tokoh masyarakat dapat memungkinkan terjadinya keberhasilan dari proses internalisasi tersebut (Mashuri, 2020).

Hal ini di tambahkan oleh pernyataan pada penelitian oleh Tri Wibowo dan Muhammad Turhan Yani Tahun (2016) mengatakan bahwa Tokoh agama yang menjadi bagian dari Tokoh masyarakat sebagai sosok yang disangka lebih ahli dalam masalah agama dan diharapkan bisa membuat pola pikir masyarakat modern yang sudah tidak ingat lagi hakekat dasar sebagai makhluk hidup yang memiliki agama (Wibowo & Yani, 2016).

Sebagaimana jika dilihat dari penelitian oleh (Wili, yosafat dan Yuhastina 2021). Tokoh pemuka agama menjadi salah satu hal pihak yang bisa mempengaruhi

untuk kehidupan yang akur dan damai. Para tokoh agama sekaligus sebagai agen perubahan yang dapat memberikan pengaruh pada perilaku masyarakat.

Selanjutnya hal tersebut dapat diperkuat dengan penelitian oleh Ahmad, Mardian, Alfikri (2022) yang mengatakan bahwa keberadaan tokoh agama memiliki banyak peran fungsi dalam dakwah agama, transmisi keilmuan, pendidikan keagamaan. Selain itu tokoh agama diyakini mempunyai kedudukan yang besar dalam masyarakat, juga berfungsi dalam pembentukan pola pemikiran keagamaan dan membentuk akhlak remaja. (Nasution, Harahap, & Alfikri, 2022).

Tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang cukup signifikan di lingkungan masyarakat. Keberadaannya dinilai penting di masyarakat karena secara langsung memiliki keteladanan yang dijadikan contoh oleh masyarakat dalam berperilaku di kehidupan sehari-harinya. Selain itu tokoh masyarakat membantu sebagai penengah ketika terjadinya permasalahan dalam masyarakat. Sehingga secara tidak langsung terjadinya proses pengendalian sosial di masyarakat, selain itu tokoh masyarakat dikaitkan juga dengan adanya proses sosialisasi di lingkungan masyarakat.

Secara umum sosialisasi memiliki dua ranah lingkup yang berbeda, pertama sosialisasi yang bersifat primer, dimana seorang individu belajar melalui ruang lingkup keluarga. Belajar yang dimaksud adalah utamanya mengenai bagaimana menjadi anggota keluarga atau masyarakat, sehingga nantinya dapat memposisikan dirinya sesuai dengan lingkungan dia berada. Selanjutnya terdapat sosialisasi sekunder dimana seorang individu belajar menjadi anggota masyarakat diluar ranah keluarga, misalnya seperti teman sepermainan, guru, organisasi, tokoh masyarakat,

media sosial dan sebagainya. Semua individu sejatinya akan selalu melewati kedua proses sosialisasi tersebut dalam kehidupannya.

Tokoh masyarakat dijadikan agen dalam proses sosialisasi sekunder di masyarakat. Pengaruh berupa keteladan sikap, pengalaman dan tindakan menjadi harapan dalam membentuk dan membiasakan karakter religius dan toleransi. Kedua karakter tersebut menjadi karakter yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, dalam hal ini termasuk masyarakat Kecamatan Ciampea, Bogor. Alasan lainnya karakter-karakter tersebut sebagai perwujudan dari pengamalan sila-sila dalam pancasila terutama sila pertama Pancasila yang menjadi dasar diantara sila-sila lainnya sehingga menunjukkan betapa penting memiliki karakter religius dan toleransi dalam setiap individu masyarakat.

Dari penjelasan diatas penelitian ini bermaksud menggunakan pendekatan kualitatif dibantu berbagai macam literatur seperti terjun lapangan menggunakan metode penelitian diskursus pengamatan atau observasi serta dokumentasi terhadap upaya internalisasi *nilai religius dan toleransi* melalui peran atau kontribusi tokoh masyarakat sebagai bagian dari kondisi multikultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Kecamatan Ciampea, kabupaten Bogor. Khususnya di Desa Ciampea, Benteng dan Cibanteng.

B. Masalah Penelitian

Konflik pada kondisi masyarakat multikultural dapat terjadi dikarenakan terdapat individu yang memosisikan dirinya paling benar sedangkan orang lain selalu salah dalam pandangannya, begitu pun sebaliknya. Cara pandang seperti itu

yang perlu diubah. Internalisasi nilai religius dan toleransi pada setiap warga negara perlu dimaknai dan dipahami dengan sebaik mungkin terutama dalam kondisi masyarakat yang multikultural.

Internalisasi nilai religius dan toleransi yang baik dapat mengambil contoh dari kondisi masyarakat multikultural di Desa Ciampea, Desa Cibanteng dan Desa Benteng, kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mulai dari dari suku, adat istiadat dan agama yang dianut berbeda terdapat disana, namun sampai sekarang jarang terjadi konflik padahal kondisinya sangat heterogen. Kolaborasi pemaknaan dan pemahaman dari pihak-pihak yang berpengaruh di lingkungan sosialnya oleh (tokoh masyarakat).

C. Fokus dan Subfokus penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu tentang proses internalisasi nilai religius dan toleransi. Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah peran tokoh masyarakat dalam internalisasi nilai religius dan toleransi pada masyarakat di Desa Ciampea dan Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di Lapangan. Peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi tokoh masyarakat dalam upaya internalisasi nilai religius dan toleransi pada masyarakat di Kecamatan Ciampea ?
2. Bagaimana perwujudan internalisasi nilai religius dan toleransi pada masyarakat di Kecamatan Ciampea ?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan penelitian juga dapat bermanfaat terutama untuk khalayak umum. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diinginkan dapat menambah pengetahuan mengenai nilai religius dan toleransi. Terkhusus mengenai pemahaman (internalisasi) nilai-nilai nilai religius dan toleransi serta tokoh masyarakat sebagai sarana atau agen dalam proses internalisasinya.

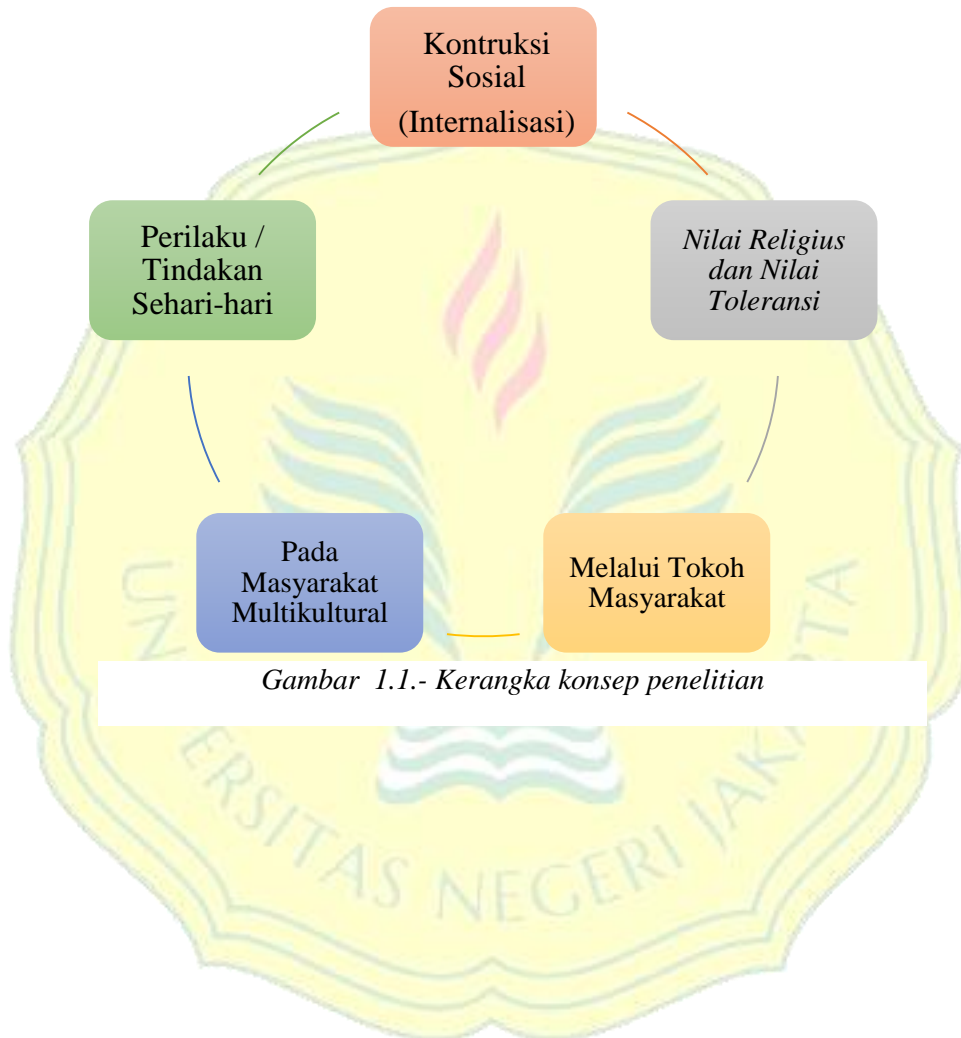
2. Secara Praktis

Penelitian ini diinginkan dapat memaksimalkan upaya internalisasi nilai religius dan toleransi dan manfaatnya. Khususnya mengenai kondisi keberagaman suku, agama dan budaya di Indonesia sebagai salah satu hal yang sangat harus disyukuri bersama-sama. Diharapkan juga akan menjadi tolak ukur salah satu upaya dalam menginternalisasikan nilai religius dan toleransi pada masyarakat luas.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan suatu keterkaitan satu konsep dengan konsep lainnya dari persoalan yang akan diteliti. Oleh karena itu, kerangka konsep penelitian ini yaitu konsep Internalisasi, nilai religius dan toleransi serta agen internalisasi (tokoh masyarakat).

A. Diagram Kerangka konsep penelitian



Gambar 1.1.- Kerangka konsep penelitian

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*